

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tindakan dalam melakukan pembangunan manusia. Terbukti sejak terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat akibat dari krisis moneter. Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Berdasarkan data statistik BPS disebutkan bahwa jumlah UMKM mencapai sekitar 97% dari populasi unit usaha, serta menampung lebih dari 92% jumlah tenaga kerja. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 %, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sebesar 3,0%, lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan usaha besar. Dari data awal ini menunjukkan betapa strategisnya pengembangan koperasi dan UMKM. Pada tabel berikut merupakan kriteria UMKM sesuai dengan pendapatan. (Nur dan Saefudin, 2013)

Tabel 1.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Usaha	Kriteria	
		Modal Usaha	Penjualan Tahunan
1	Usaha Mikro	Maks. Rp1.000.000.000,00 (*	Maks. Rp2.000.000.000,00

No	Usaha	Kriteria	
		Modal Usaha	Penjualan Tahunan
2	Usaha Kecil	>Rp.1.000.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 (*)	>Rp.2.000.000.000,00 – Rp15.000.000.000,00
3	Usaha Menengah	>Rp5.000.000.000 - Rp10.000.000.000,00 (*)	>Rp15.000.000.000,00 - Rp50.000.000.000,00

Keterangan: (*) Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sendiri telah membuat suatu produk hukum yang dikhususkan tentang pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berangkat dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila bahwa masyarakat yang adil dan makmur harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional.

Salah satu program yang menjadi solusi untuk memberdayakan UMKM di Indonesia adalah Program Kemitraan (PK). Program Kemitraan merupakan sebuah program yang mendasari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan merupakan bagian dari pihak yang memiliki andil dalam memperkuat perekonomian masyarakat, saat ini tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berorientasi pada aspek keuntungan secara ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek social dan lingkungannya. (Yuniarti, 2013)

Dalam hal ini Kota Semarang sebagai salah satu Kota yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan UMKM, hal ini dikarenakan Kota Semarang memiliki banyak produk-produk UMKM unggulan yang mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan (Hanif dan Budi, 2019). Pelaksanaan program ini didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai Kota yang memiliki kebijakan yang mengatur tentang PKBL yakni Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari dibentuknya Perda ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan keselarasan dan

keharmonisan penyelenggaraan PKBL BUMN, BUMD dan perusahaan sebagai salah satu kewajiban BUMN, BUMD dan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Perda tersebut Walikota Semarang membuat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang PKBL Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.

Upaya ini terlihat jelas bahwa Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memberdayakan UMKM di Kota Semarang dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan besar yang ingin menyalurkan sebagian laba dari pendapatan yang dimiliki untuk dipinjamkan ke pelaku UMKM di Kota Semarang. Salah satu upaya yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan mengajak para pelaku UMKM untuk menjalin hubungan kemitraan baik itu dengan usaha besar, antar jenis usaha atau CSR dengan BUMN dan BUMD Kota Semarang. (Hanif dan Budi, 2019)

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan perusahaan dalam melaksanakan PKBL sesuai dengan visi misi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberdayakan UMKM. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum tersampaikan sepenuhnya pada berbagai perusahaan.

PT Kawasan Industri Wijayakusuma merupakan salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan ini. Sesuai dengan misinya disebutkan bahwa PT KIW berkomitmen untuk *“menumbuh kembangkan korporasi serta memberi kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan nasional.”* Serta PT KIW dalam melaksanakan Program Kemitraan selalu berpedoman pada pemerintah pusat dimana tercantum pada BAB III Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang menyebutkan bahwa *“Perum dan Persero wajib untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini”*.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan PKBL ini dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Semarang. Didalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan PKBL yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Namun fakta dilapangan ditemukan terdapat permasalahan yakni Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya menginformasikan mengenai program PKBL ke berbagai perusahaan besar di Kota Semarang khususnya ke PT KIW. Disisi lain berdasarkan observasi lapangan bahwa PT KIW belum mengetahui tentang adanya peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Saat ini PT KIW dalam melaksanakan PKBL sendiri didasarkan langsung pada peraturan pusat.

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya proses komunikasi. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan diperlukannya sosialisasi untuk menginformasikan ke kelompok sasaran agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas (Reina dan Amni, 2019). Penyampaian informasi kebijakan publik perlu dilandasi dengan beberapa macam dimensi, yaitu dimensi transformasi (transmisi) komunikasi, dimensi kejelasan komunikasi, dan dimensi konsistensi komunikasi (DE Nurati, 2016). Selain itu berdasarkan jurnal mengenai Implementasi Program Kemitraan dalam persepektif Pemerintahan dengan studi PT Petrokimia Gresik ditemukan bahwa pelaksanaan program kemitraan terdapat tiga actor penting didalamnya yakni Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat (mitra binaan). Penelitian juga menemukan bahwa terdapat sinergi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat namun sinergi yang kurang maksimal dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Gresik. (Wati, Zauhar, dan Wanusmawatie, tanpa tahun)

Terdapat fenomena yang ditemukan yakni permasalahan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai komunikasi yang dilakukan stakeholders dalam pelaksanaan PKBL di Kota Semarang. Melalui penelitian ini agar dapat diketahui bagaimana kebijakan Program Kemitraan yang akan diimplementasikan terlebih dahulu

dikomunikasikan, sehingga tergambar proses komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang khususnya kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma serta melihat bagaimana implementasi program kemitraan yang dilakukan PT Kawasan Industri Wijayakusuma. Untuk itu judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah “Komunikasi Implementasi Program Kemitraan Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah: Bagaimana Komunikasi Implementasi Program Kemitraan Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi

1. Bagaimana Komunikasi Implementasi Program Kemitraan Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma)?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan PT Kawasan Industri Wijayakusuma?

1.4 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana keberhasilan komunikasi implementasi program kemitraan sebagai upaya memberdayakan UMKM di Kota Semarang dengan studi kasus PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

1.5 Fungsi Teriotis

1. Secara teriotis penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang tentang komunikasi implementasi

program kemitraan sebagai upaya memberdayakan UMKM di Kota Semarang dengan studi kasus PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian lain dengan konsentrasi Komunikasi Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang.

1.6 Fungsi Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Komunikasi Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kota Semarang.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang manfaat adanya pemberdayaan, dan masyarakat dapat turut berpartisipasi serta bekerja sama dalam mengembangkan UMKM di Kota Semarang khususnya di sekitar Kawasan Industri Wijayakusuma.

1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

1. Judul Penelitian: *The Implementation of Partnership Program in Gresik Regency Based on Governance Perspective (Case Study at PT Petrokimia Gresik)*

Penulis: Susilo Wati, Soesilo Zauhar, Ike Wanusmawatie

Ringkasan: Konsep governance menawarkan interaksi antara tiga aktor utama dalam implementasi suatu kebijakan, aktor tersebut adalah pemerintah, masyarakat dan privat yang dikenal dengan iron triangle. Jurnal ini akan membahas sinergi ketiga aktor dalam implementasi program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik dalam mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Gresik berdasarkan perspektif governance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat sinergi yang baik antara privat (PT Petrokimia Gresik) dan masyarakat (mitra binaan) dalam implementasi

program kemitraan, sayangnya sinergi dengan pemerintah masih kurang maksimal, khususnya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh beberapa alasan, sehingga pada akhir jurnal ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ada.

2. Judul Penelitian: *Communication Of Public Policy in Implementing Kampung Tematik Program in Rejomulyo Subdistrict of Semarang*

Penulis: Reina Hapsari Ayuningtyas dan Amni Zarkasyi Rahman, 2019

Ringkasan: penelitian ini menjelaskan tentang program kampung tematik yang sejatinya dibentuk untuk menangani kemiskinan di Kota Semarang. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan terkait komunikasi yang terjalin antar *stakeholders*. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi yang terjalin antar stakeholders dalam implementasi kebijakan program kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang, adapun fenomena yang akan diteliti yaitu komunikasi yang dilakukan *stakeholders* dan implementasi program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang berupa Sosialisasi Perencanaan Kampung Tematik yang diikuti oleh perwakilan seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang, *workshop* dan *FGD*, sedangkan PT PLN melakukan komunikasi dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang bantuan CSR Bina Lingkungan yang akan dilaksanakan di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh akademisi Polines adalah dengan menawarkan bantuan kepada pihak Ketua RW 002 dengan cara *door to door* dan rapat koordinasi yang di hadiri oleh beberapa warga dan tokoh masyarakat setempat. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa satu *stakeholders* dalam mengkomunikasikan bantuan yg akan diberikan kepada warga kampung batik yang menimbulkan *mis-interpretasi*, kemudian

terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan akademisi. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: perlu adanya peningkatan kesadaran antar stakeholders dalam melakukan kerjasama diperlukan komunikasi yang intensif antar stakeholders agar meminimalisir perbedaan pemahaman dalam komunikasi yang dilakukan oleh para stakeholders.

3. Judul Penelitian : *Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwahi.*

Penulis : Ahmad Khoirul Syani, Shohibul Mufid, dan Mufarrihul Hazin

Ringkasan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun diimplementasikan pada sebuah daerah dalam aspek komunikasi dan sosialisasinya. Apabila tidak ada komunikasi dan penyampaian serta sosialisasi yang baik, maka suatu kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik pula. Dalam implementasinya, keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pandangan George C Edwards III, salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edwards III adalah komunikasi. Komunikasi menjadi pengaruh nomor 1 dalam implementasi kebijakan karena awal dari sebuah dijalankannya implementasi kebijakan karena ada komunikasi yang di dalamnya terdapat sosialisasi dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Ngadiluwahi sudah berjalan dengan baik dan mencapai angka hampir 100% didik. Pada tahap sosialisasi, menggunakan cara sosialisasi secara langsung kepada peserta didik melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan sekolah saat pembagian rapor maupun pertemuan yang lain dan melibatkan petugas UPTD. Selain itu tingkat kesadaran yang tinggi membuat sosialisasi yang dilakukan menjadi sangat efektif dan efisien. Kemudian pada indikator kejelasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar 9 tahun tidak mengalami kesimpangsiuran informasi, hal ini didukung dengan realita

yang ada di masyarakat setempat dengan terselenggaranya dengan baik dari komunikasi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Ngadiluwih ini. Pada penelitian ini ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: 1. Transmisi komunikasi; 2. Kejelasan komunikasi; 3. Konsistensi komunikasi.

4. Judul Penelitian : *“Policy Implementation: Some Aspects and Issues”*.

Penulis : Anisur Rahman Khan

Ringkasan: Penelitian ini berisi aspek-aspek dan permasalahan implementasi kebijakan dan pandangan kritis mengenai teori-teori para ahli yang sudah ada sejak dulu. Menurutnya, salah satu masalah pada implementasi kebijakan adalah kurangnya arahan atau pedoman yang tepat tentang bagaimana cara mengimplementasikannya. Sudah jelas, arah seperti itu seharusnya berasal dari teori yang seharusnya diikuti. Masih belum adanya teori yang lengkap, karena sebagai suatu disiplin ilmu implementasi masih dalam masa pertumbuhan (Goggin, Bowman, Lester, & O’Toole, 1990) dan selama bertahun-tahun, implementasi juga telah serius diabaikan dalam domain administrasi publik yang lebih luas yang dibatasi pengembangan teoritis dari disiplin ilmu ini. Terlebih lagi, implementasi kebijakan tertentu adalah konteks yang sangat spesifik karena tergantung pada politik, sosial, faktor ekonomi, organisasi dan sikap yang mempengaruhi seberapa baik atau seberapa buruk kebijakan atau program yang telah dilaksanakan (Meter&Horn, 1975, Stewart et al,2008) dan itu juga sangat bervariasi dari waktu ke waktu, lintas kebijakan, dan satu negara ke negara lain (Goggin et al, 1990). Contohnya pelaksanaan kebijakan apapun secara demokratis negara sering diteliti oleh berbagai pemangku kepentingan padahal sangat mudah untuk negara otokratis untuk menerapkan kebijakan apapun karena ada sedikit peluang untuk pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses. Sehingga penelitian ini menyoroti masalah teoritis seputar implementasi kebijakan dan mengembangkan keterkaitan dengan kegagalan implementasi untuk memperluas pemahaman tentang disiplin ilmu ini.

5. Judul Penelitian : *The Role of Existence of PT Kawasan Industri Wijayakusuma in Economy Improvement of The Surrounding Community*

Penulis : Istiqomah. 2018

Ringkasan: Perubahan yang ditimbulkan dari adanya pembangunan industri dapat menghasilkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pembangunan industri dilihat dari bidang ekonomi diantaranya penyerapan tenaga kerja. Keberadaan industri di suatu wilayah tentu akan membutuhkan tenaga kerja dan biasanya masyarakat sekitar industri akan lebih banyak kesempatan untuk terserap dan bekerja di sektor industri tersebut. Selain itu dengan adanya industri di suatu wilayah akan membuka lapangan pekerjaan lain seperti adanya warung makan dan penyewaan rumah atau kontrakan untuk para pekerja dari luar wilayah tersebut dan harga jual tanah di sekitar kawasan industri pun akan tinggi. Adanya pembangunan industri di suatu wilayah akan memberikan perubahan yang amat berarti dalam struktur perekonomian masyarakat. Dari latar belakang tersebut skripsi ini mengambil rumusan masalah mengenai peran Kawasan Industri Wijayakusuma dalam peningkatan Perekonomian masyarakat Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis untuk melihat seperti apa peran Kawasan Industri Wijayakusuma dalam peningkatan perekonomian masyarakat Karanganyar. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dengan data sekunder data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di pondok pesantren tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Peran Kawasan Industri Wijayakusuma dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu KWI memberi peran nyata yang sangat besar bagi masyarakat Karanganyar, yaitu Peningkatan perekonomian masyarakat menjadi meningkat, menjadikan anak-anak sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, terciptanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pengangguran khususnya pada Masyarakat

Karanganyar. Ada juga peran yang diharapkan yaitu seperti masalah lingkungan yang harus lebih di perhatikan lagi oleh pihak kawasan.

6. Judul Penelitian : *The Influence of Corporate Social Responsibility Program for Community Empowement Against Increased. (Study at Implementation of CSR PT Amerta Indah Otsuka Pacarkeling Village District of Kejayan Pasuruan*

Penulis : Yuniarti, Irwan, Abdul, 2013

Ringkasan: penelitian ini bertuj Penelitian ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan populasi yaitu jumlah penduduk di Desa Pacarkeling yaitu sebanyak 3.358 jiwa dan sampel penduduk sebanyak 97orang dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dan pengaruh secara simultan dan parsial. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dan parsial antara variabel sosial, ekonomi dan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

7. Judul Penelitian : *The Efforts of Semarang Government and Batik Craft Participation in Empowerment of Batik Craft (Study at Office of Cooperatives and UMKM in Semarang, Rejomulyo Batik Regency*

Penulis : Hanif, Budi, 2019

Ringkasan: Kota Semarang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM salah satunya adalah UMKM kerajinan Batik Semarangan. Akan tetapi, sampai saat ini belum dapat berkembang dan masih memiliki beberapa permasalahan. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang,

partisipasi para pengrajin batik serta kendalanya. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang dalam pemberdayaan UMKM kerajinan batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang sudah cukup baik berdasarkan aspek pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat-guna, sedangkan partisipasi para pengrajin batik sendiri dalam pemberdayaan UMKM kerajinan batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang juga sudah cukup baik berdasarkan aspek partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala, yaitu kurangnya akses pemasaran produk, kesulitan dalam mencari tenaga kerja serta paguyuban kampung batik yang kurang aktif. Untuk itu, saran yang dapat diberikan, yaitu Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang perlu membuat dan mengadakan pelatihan *website*, memasang spanduk dan melakukan pemberitaan di media cetak dan media elektronik, harus berkoordinasi dengan beberapa institusi serta melakukan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terkait pelatihan membatik, perlu meningkatkan fungsi pemantauan terhadap paguyuban, sedangkan untuk para pengrajin batik harus dapat memanfaatkan media internet dan media sosial untuk promosi produk batik, harus lebih responsif dan antusias untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi mudanya serta harus lebih sering dan intens mengadakan sosialisasi dan aktivitas membatik melalui paguyuban tersebut.

8. Judul Penelitian : *Industrial Area Development in Maximizing Regional Original Income in Semarang City Sustainable Development Concept Perspektif*

Penulis : Muhammad Junaidi, 2015

Ringkasan: Di Kota Semarang terdapat 9 (sembilan) kawasan Industri tersebut adalah kawasan industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Tugu, dan Kawasan Industri Sinar Centra Cipta. Tingkat okupansi sembilan kawasan industri seluas 1.029 hektare di kota itu mencapai 75%. Namun pada sisi lain persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah lingkungan hidup. Materi dan muatan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata dan Ruang Wilayah telah baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah saat ini untuk menjabarkan kebijakan tersebut di lapangan. Indikator adanya ketidak konsistenan tersebut adalah terdapat pembiaran atas pembuangan limbah pada beberapa lokasi kawasan industri. Selayaknya dengan pengembangan kawasan industri, pemerintah secara sadar menjadi dipermudah dalam melakukan pengontrolan apabila terjadinya penyimpangan. Namun jika pemerintah tidak serius dan hanya berorientasi keuntungan semata, maka akan dikhawatirkan menimbulkan problematika di kemudian hari yaitu persoalan dilema dan ketimpangan pembangunan yang utamanya diharapkan dapat dijalankan pada masa yang akan datang.

1.8 Kerangka Teori

1.8.1 Kebijakan publik

Kebijakan publik berangkat dari adanya suatu permasalahan yang timbul di sekitar masyarakat ataupun merupakan tujuan dari pemerintah dalam merealisasikan program pemerintah. Untuk itu dalam mencapai keinginan tersebut pemerintah memerlukan untuk membuat suatu kebijakan publik. Dalam hal ini kebijakan merupakan suatu keputusan-keputusan yang ditetapkan serta bertujuan untuk membatasi perilaku serta tindakan masyarakat ataupun melindungi

masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam membuat kebijakan publik pemerintah memerlukan informasi yang *up to date*, karena para pembuat kebijakan sebelum menyusun keputusan-keputusan diwajibkan untuk mengetahui segala permasalahan yang ada di masyarakat sehingga target atau tujuan dari adanya kebijakan publik dapat tercapai serta tepat sasaran. Kebijakan ini tidak hanya mementingkan prinsip ekonomis, efisiensi dan administrative, namun pembuat kebijakan harus memiliki dasar dan pertimbangan etika dan moral. Dengan hal itu masyarakat merasa tidak dirugikan dan pemerintah dapat mencapai tujuannya. Sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1), Chandler dan Plano menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan

Thomas R Dye, dalam Miftah Thoha (2011: 107) mengemukakan public policy atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengetahuan tersebut, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan pemerintah.

Sedangkan menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Secara etimologis, policy berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi politia yang

berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (the middle English), kata tersebut menjadi *policie* yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003: 7). Uniknya, dalam bahasa Indonesia kata kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* tersebut mempunyai konotasi tersendiri. Kata tersebut mempunyai akar kata *bijaksana* atau *bijak* yang dapat disamakan dengan pengertian *wisdom* yang berasal dari kata sifat *wise* dalam bahasa Inggris

Dari definisi-definisi di atas terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari konsep kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative. *Kelima*, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

1.8.2 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yang dibuat tentu saja tidak hanya sebatas sekumpulan atura-aturan yang dituliskan dalam sekumpulan “lembaran naskah”. Kebijakan publik juga perlu untuk dilakukan “tindakan nyata” dalam melakukannya. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam tahapan kebijakan, karena dengan implementasi kebijakan akan memperlihatkan timbal balik dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu keadaan dimana para stake holders telah memiliki peraturan yang sebelumnya

dilakukan analisis dan penentuan kebijakan yang tepat dan telah ditetapkan secara hukum, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012:674). Sementara Meter dan Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang disahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Djadja Saefullah (dalam Arifin, 2011:83) mengatakan bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami dari dua perspektif, yakni; pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, persepektif administrative, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta kemampuan para pejabat publik (official officer) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Dari kedua perspektif tersebut kebijakan publik dapat membantu kita untuk lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujudkan.

Definisi lain dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (dalam Tachjan, 2006:33) mengemukakan isi dari program implementasi harus menggambarkan kepentingan yang terpengaruhi oleh program, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuat keputusan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan.

Lalu pendapat lain dikemukakan oleh Daniel Mazamanian dan Paul Sabatier (dalam Widodo, 2010:87) menerangkan bahwa implementasi memiliki makna yaitu

memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Dengan demikian pemahamn tersebut meliputi usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

George C Edwards III (1980) (dalam Riant Nugroho, 2009), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*, menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

- a) Komunikasi
- b) Sumberdaya
- c) Disposisi, dan
- d) Struktur birokrat

Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan, atau antara visi dengan realitas. Keadaan demikian oleh Hogwood dan Gun (1986) disebut *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Kegagalan implementasi dapat terjadi dalam setiap kebijakan selama proses pelaksanaanya berlangsung. Dimana kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Grindle (1980) (dalam Tachjan, 2006) menyebutkan 3 hambatan besar yang seringkali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni

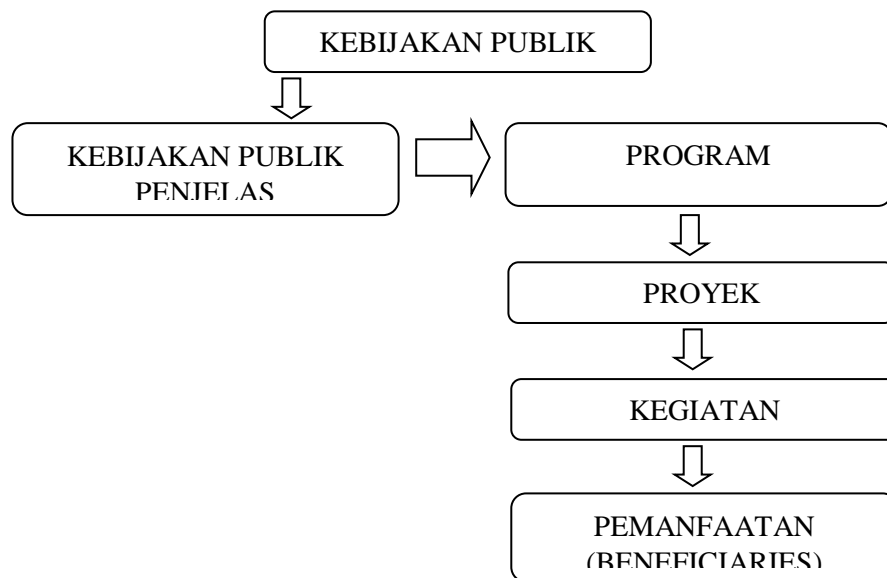
1. Ketiadaan kerjasama vertical, antara atasan dengan bawahan
2. Hubungan kerja horizontal yang tidak sinergis
3. Masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2

Sekuensi implementasi kebijakan publik



Sumber: Riant Nugroho. 2009. Pulic Policy

Terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah *top-down* dinamakan dengan “*the command and control approach*” (pendekatan control dan komando) dan istilah *bottom-up* dinamakan “*the market pproach*” (pendekatan pasar).

1. Pendekatan *top-down*

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kita dapat memandang proses kebijakan sebagai suatu rangkaian perintah dimana para pemimpin politik

mengartikulasikan suatu preferensi kebijakan yang jelas yang akan dilaksanakan dengan cara semakin spesifik seiring dengan perjalanan kebijakan tersebut melalui mesin administrative yang melayaninya.

Pendekatan ini menekankan pada sampai sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pada aktivitas-aktivitas dari mesin implementasi yang diberi mandate secara legal yang menawarkan indikasi-indikasi jelas mengenai apa yang harus dipahami oleh pelaksana dan mengenai apa tujuan yang ingin dicapai.

2. Pendekatan *bottom-up*

Pendekatan ini dimulai dari semua publik dan para actor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program-program dan pengkajian tujuan-tujuan pribadi dan organisasi mereka, strategi-strategi mereka, dan jaringan dari kontak yang telah mereka bangun.

Keunggulan terpenting dari pendekatan *bottom-up* adalah mengarahkan perhatian pada hubungan-hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

1.8.3 Komunikasi Kebijakan

Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan menurut pandangan George C Edwards III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2)

sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi merupakan faktor penting guna menentukan keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan publik. Sebagaimana mengutip dari Agustino (2006:157) Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Menurut Winarno (2005), Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, kepentingan politik, sampai dengan adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Effendy, (2003 :55) mengatakan fungsi komunikasi, yaitu menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), memengaruhi (*to influence*). Sedangkan, Senjaya (2008 :4.8) mengemukakan empat fungsinya, yaitu fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif⁹. Salah satu fungsi penting komunikasi adalah fungsi informasi melalui berbagai bentuk kegiatan komunikasi seperti tatap muka, sosialisasi, pelaporan lisan atau tertulis, penyebaran informasi dengan menggunakan sarana komunikasi papan nama dan rambu penunjuk, dan komunikasi media massa.

Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan,

program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

George C. Edwards sebagaimana dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi didalam implementasi kebijakan, yaitu: Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Untuk itu berdasarkan penjelasan Teori oleh pakar diatas peneliti memiliki dasar dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini teori George C Edwards dipilih sebagai acuan pada penelitian ini dikarenakan teori ini sangat relevan dengan permasalahan yang ada, yakni mengenai transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi Komunikasi. Serta jika dilihat dari pola kebijakannya,

program Kemitraan ini memiliki pola Top-Down, dimana sesuai dengan teori Lester dan Stewart.

1.8.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (umkm)

Pemerintah Indonesia dalam mendefinisikan UMKM telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Definisi tersebut termuat pada BAB I (ketentuan umum), pasal 1 dari undang-undang tersebut yang berbunyi.

- a. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
- d. Dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1.8.5 Pemberdayaan

Pemberdayaan atau empowerment adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada. Menurut Sedarmayanti (Sukino 2016:61) empowerment berasal dari kata “*power*” yang berarti “*control, authority, dominion*” dengan awalan “*em*” yang berarti “*on put to*” atau “*to cover with*” sehingga arti dari kaya “*empowering*” adalah “*is passing on authority and responbility*” yaitu *attention* : lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yng dimiliki.

Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Wilson (Mardikanto, 2013:122) adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki. Tanpa adanya keinginan ini, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat tidak akan mendapat perhatian masyarakat.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk berubah. Berani untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
3. Kemauan untuk berpartisipasi. Yakni mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengampil bagian dalam kegiatan.
4. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
5. Tumbuhnya motivasi, hal ini tumbuh karena kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Teori mengenai tahap pemberdayaan yang lain yakni tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (Wrihatnolo : 2007) sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran, memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan.
2. Tahap pengkapasitasan, memampukan masyarakat kurang mampu agar memiliki ketrampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan – pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan *lifeskill*.
3. Tahap Pendayaan, tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan

1.9 Operasionalisasi konsep

Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi Implementasi program Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dengan melihat upaya pemberdayaan PT Kawasan Industri Wijayakusuma terhadap para pelaku UMKM di sekitar kawasan. Penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan pada variabel komunikasi yang dipaparkan oleh Geoge C Edwards, beliau mengemukakan terdapat beberapa dimensi keberhasilan komunikasi yaitu Transmisi Komunikasi, Kejelasan Komunikasi, Konsistensi Komunikasi.

Adapun fenomena penelitian adalah proses komunikasi program kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, yang dilihat dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi yang dilakukan.

Selain itu, peneliti juga melihat fenomena pemberdayaan mitra binaan yang dilakukan PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebagai bentuk implementasi program tersebut.

Adapun konsep ini dioperasionalkan melalui:

A. Komunikasi yang merupakan implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Pemerintah Kota Semarang. Sebagai berikut:

1. Transmisi komunikasi

Dalam dimensi transmisi, kebijakan harus disampaikan kepada:

- a) Pelaksana.
- b) Kelompok sasaran.
- c) Kelompok kepentingan.

2. Kejelasan komunikasi

Dimensi ini berisi tentang bagaimana kebijakan di komunikasikan dengan jelas. Indikator dari kebijakan yang disampaikan dengan jelas mencakup:

- a) Maksud dari kebijakan.
- b) Tujuan dari kebijakan.
- c) Sasaran kebijakan.

- d) Substansi kebijakan.
- 3. Konsistensi/ keberlanjutan komunikasi
 - Apabila pada indikator transmisi proses komunikasi dan penyampaian dilaksanakan dengan baik maka informasi yang diberikan akan menjadi jelas dan konsisten.
- B. Implementasi program kemitraan yang dilakukan PT Kawasan Industri Wijayakusuma
 - a) Pengajuan
 - b) Penyaluran dana
 - c) Monitoring perkembangan usaha
 - d) Pembayaran
 - e) Pemberdayaan mitra binaan PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

1.10 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan jenis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta fenomena-fenomena menurut pandangan dari definisi partisipan. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

1.10.1 Desain penelitian

Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian eksploratif dan deskriptif. Hal ini juga dinyatakan Masri Singarimbun (Singarimbun, 1989:4) dalam bukunya yang menyatakan dua jenis penelitian tersebut, yaitu:

- a. Penelitian Dekriptif
 - Suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala dan menetapkan pengaruh antar gejala-gejala yang ditemukan.
- b. Penelitian Eksploratif

Studi penelitian yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu, dengan maksud untuk merumuskan masalah-masalah secara terperinci.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menemukan hipotesis serta hubungan antar variabel, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses komunikasi implementasi program kemitraan di Kota Semarang dan permasalahan kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan angka-angka. Jika terdapat angka-angka, maka sifatnya hanya sebagai penunjang saja. Penelitian yang bersifat deskriptif hanya bertujuan menggambarkan sasaran yang tepat, sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala dari suatu kelompok atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala-gejala yang lain dalam masyarakat (objek penelitian).

1.10.2 Situs Penelitian

Pemerintah Kota Semarang dipilih menjadi lokus penelitian atau wilayah penelitian dikarenakan Pemerintah Kota Semarang merupakan pelaksana yang memiliki tanggungjawab untuk mengkomunikasikan PKBL ke berbagai perusahaan Daerah Kota Semarang. PT Kawasan Industri Wijayakusuma dipilih menjadi lokasi penelitian karena kawasan industri ini dalam melakukan pengembangan telah berusaha dalam menyediakan ruang bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, kawasan industri ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive (sampel bertujuan). (Sugiyono, 2008:218-219), teknik purposive yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Fuad dan Nugroho, 2014 : 58).

Adapun informan dalam penelitian ini yang diambil berdasarkan teknik purposive yaitu Sekda Bagian Perekonomian Kota Semarang yang bertugas sebagai sekretaris yang melaksanakan Program Kemitraan ini, BAPPEDA Kota Semarang yang memiliki wewenang dalam melakukan koordinasi terkait perencanaan Program Kemitraan dengan Semua OPD di Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang bertindak sebagai pelaksana Program Kemitraan untuk bisa memfasilitasi perusahaan yang ingin menyalurkan dana modal usaha kepada UMKM di Kota Semarang, PT Kawasan Industri Wijayakusuma yang bertindak sebagai perusahaan BUMN yang diwajibkan untuk melaksanakan Program Kemitraan, dan pelaku UMKM yang mendapat pinjaman dana Program Kemitraan berupa modal usaha. Informan ini dipilih karena dinilai berkompeten untuk memberikan informasi dan data yang menunjang penelitian ini.

1.10.4 Sumber data

Lofland dan Lofland (Moleong, 2010:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Peneliti dalam melakukan penelitian ini melihat kondisi dari Pemerintah Kota Semarang dalam mengkomunikasikan Program nya ke berbagai perusahaan di Kota Semarang dan juga peneliti melihat PT Kawasan industri Wijaya Kusuma khususnya dalam memberdayakan UMKM di sekitar kawasannya. Sehingga dapat diketahui gejala apa saja yang ada di Kawasan Industri tersebut. Peneliti juga mewawancarai orang yang sudah dijadikan informan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi pemberdayaan UMKM di Kawasan Industri Wijaya Kusuma dalam memberi ruang bagi sektor informal. Dalam melakukan wawancara tersebut tentunya

peneliti bertanya dan kemudian mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh informan, sehingga dapat dijadikan data dalam penelitian ini.

b. Sumber Tertulis

Menurut Moleong (Moleong,2010:159) dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang bersumber dari sumber tertulis. Dalam penelitian ini data tertulis berupa dokumen resmi Bagian Perekonomian Kota Semarang yang berisikan alur-alur pelaksanaan Program Kemitran serta visi dan misi pelaksanaan program Kemitraan Kota Semarang, selain itu dokumen resmi didapatkan dari pihak PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma berupa penjelasan mengenai visi misi PT KIW dalam melaksanakan Pogram Kemitraaan, Rencana penyaluran dana Program Kemitraan PT KIW, SOP pelaksanaan Program Kemitraan PT KIW, dan website Program Kemitraan PT KIW.

c. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif (Moleong,2010:160). Foto yang digunakan pada penelitian ini merupakan foto kondisi UMKM yang berada di sekitar PT KIW, selain itu foto ketika wawancara peneliti kepada narasumber penelitian dan juga foto usaha yang dimiliki para mitra binaan PT KIW.

1.10.5 Jenis Data

Penelitian tentang Komunikasi Implementasi Program Kemitraan dalam memberdayakan Usaha Mikro di Kota Semarang dengan studi kasus PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma ini mempunyai jenis data sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh langsung dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Data-data ini diperoleh langsung dengan mendatangi pihak Pemerintah Koa Semarang seperti Bagian Perekonomian Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang dan juga PT Kawasan Industri Wijayakusuma lalu melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Kemudian data yang diperoleh dapat dicatat dan direkam.

- b. Data sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan buku, internet dan dokumen-dokumen yang mendukung. Buku yang digunakan adalah buku yang memuat pengetahuan mengenai pengembangan Kawasan Industri dan penataannya, serta dapat dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen didapatkan secara langsung baik dari pihak Pemerintah Kota Semarang seperti Bagian Perekonomian Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan juga PT Kawasan Industri Wijayakusuma atau didapat dari internet. Dokumen tersebut adalah dokumen yang dikeluarkan instansi terkait sehingga berhubungan dengan permasalahan ini. Jika dokumen didapatkan dari internet, maka dokumen tersebut tidak harus dokumen yang dikeluarkan oleh instansi tersebut, bisa saja dari instansi yang lain, tetapi tetap mendukung.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini antara lain adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2009:140) pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan

yang akan ditanyakan. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur ini agar penulis bebas untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi. Sehingga tidak ada batasan untuk penulis dalam menggali informasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan interview guide sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan subyek penelitian agar wawancara dapat lebih terstruktur dan terjaga sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan tipe observasi Non-Partisipan (*Non Participant Observation*). Pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan ini tidak mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tahap tingkat makna. Pada pengumpulan data observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat yang sedang diamati. Dari segi instrumen yang digunakan, penulis menggunakan tipe observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak disiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan diobservasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mengetahui secara pasti mengenai apa yang diamati. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku namun hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2011:143) metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di instansi terkait.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, Perda, Perwal, laporan-laporan, dokumen-dokumen yang ada serta menggunakan internet.

1.10.7 Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009:273). Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam triangulasi sumber bukan lah untuk mendapatkan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran, melainkan untuk mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kualitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara nantinya akan di cek juga dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda maka penulis akan berdiskusi lebih lanjut dengan informan atau sumber data yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Selama penelitian ini, proses triangulasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kualitas data yang ada. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti ketika melakukan wawancara mendapat informasi dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengenai forum PKBL yang terhenti, untuk itu peneliti mencoba untuk mengkroscek ke Bagian

Perekonomian yang merupakan Sekretaris pelaksanaan Program Kemitraan di Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga menemukan informasi mengenai proses komunikasi yang tidak terjalin antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT KIW, untuk itu peneliti mencoba mengkosok ke pihak Pemerintah Kota Semarang mengenai hal tersebut. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kemudian penulis juga membandingkan hasil wawancara dari pihak Pemerintah Kota Semarang seperti Bagian Perekonomian Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan juga PT Kawasan Industri Wijayakusuma serta pelaku sektor informal. Data yang diperoleh dari informan-informan tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan, mana pendapat yang berbeda, dan mana pendapat yang sama, sehingga nantinya bisa dihasilkan kesimpulan yang merupakan kesepakatan dari beberapa informan tersebut. Selain itu penulis juga membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan dokumen yang ada.

1.10.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

a. Reduksi Data

Semakin lama peneliti melakukan penelitian di lapangan maka akan diperoleh data yang semakin banyak, kompleks dan rumit sehingga perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009:247). Dengan demikian

data yang di reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan lebih mempermudah peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya serta mencari bila diperlukan. Dengan melakukan reduksi data, maka peneliti akan merangkum dan mengambil data pokok yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, kecil dan angka.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2009:294). Dalam penelitian ini pun peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana Komunikasi Implementasi Program Kemitraan dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang dengan studi kasus PT Kawasan Industri Wijayakusuma dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain menggunakan teks naratif, penulis juga menggunakan grafik, gambar atau tabel-tabel untuk menyajikan data. Dengan melakukan penyajian data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman mengenai apa yang terjadi.

c. Kesimpulan

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ada bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang diambil pada awal tahap penelitian didukung oleh bukti-bukti kuat, valid dan konsisten saat pengambilan data maka kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009:253)